



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 85 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disingkat UPT Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang farmasi.
- (2) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas yang mempunyai wilayah kerja pada seluruh

aspek pelayanan farmasi di lingkup Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam persediaan dan penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan gudang/instalasi farmasi dan pelayanan farmasi;
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Kepegawaian

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Instalasi Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Eselon

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## Bagian Keempat

### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pejabat Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Instalasi Farmasi dalam kegiatan pelayanan dan pengelolaan instalasi farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Instalasi Farmasi;
  - b. pelaksanaan pembinaan aparatur, pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
  - c. pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan UPT Instalasi Farmasi;
  - d. pelaksanaan kegiatan tugas di lingkungan UPT Instalasi Farmasi sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing;
  - e. penyusunan kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan;
  - f. pelaksanaan pencatatan setiap kegiatan instalasi farmasi meliputi persediaan dan penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
  - g. pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit-unit pelayanan kesehatan;
  - h. pelaksanaan administrasi penatausahaan instalasi farmasi;
  - i. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pelayanan farmasi;
  - j. penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Instalasi Farmasi;
  - k. penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Instalasi Farmasi;
  - l. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Instalasi Farmasi;
  - m. pengelolaan keuangan dan aset UPT Instalasi Farmasi;
  - n. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
  - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Instalasi Farmasi;
  - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
- a. menyusun rencana kerja UPT Instalasi Farmasi;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Instalasi Farmasi;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Instalasi Farmasi;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Instalasi Farmasi;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Instalasi Farmasi;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Instalasi Farmasi;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Instalasi Farmasi baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Instalasi Farmasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPT Instalasi Farmasi dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Instalasi Farmasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

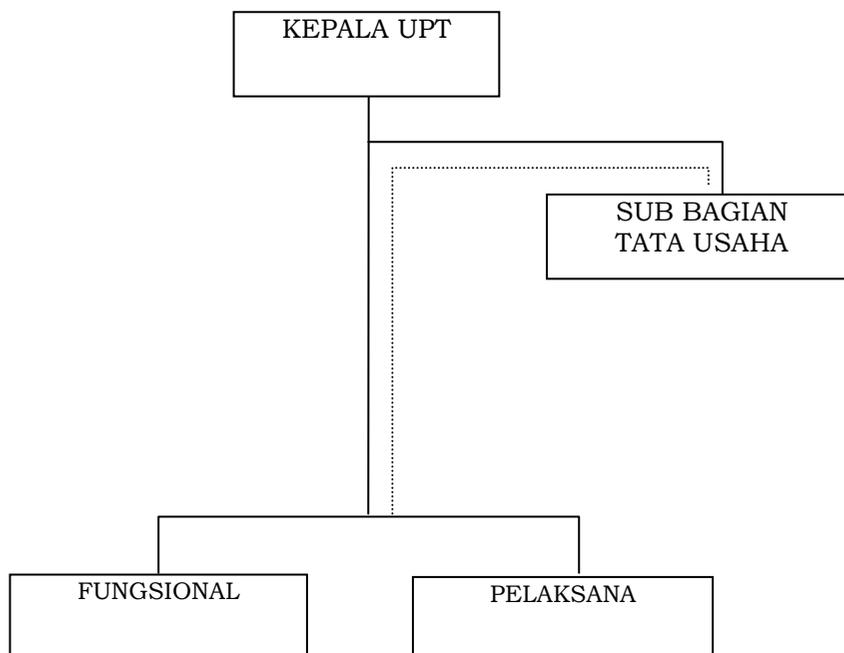
ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 85

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 85 TAHUN 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI  
FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM